

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah yang dalam penelitian ini disingkat menjadi UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap berkembang dan hidup, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Menurut Aylin Ates dan Umit Batici (2013), Usaha Kecil dan Menengah tidak diragukan lagi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun bagaimana mempertahankan kinerja mereka dalam jangka panjang merupakan tantangan besar.

Untuk menjalankan aktivitas usahanya seringkali pengelola usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahannya. Kesulitan ini menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usahanya. Apalagi jika harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. Pencatatan dilakukan hanya dengan menghitung selisih antara uang masuk dan uang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk atau dari alokasi kegiatan usaha atau non usaha. Kebanyakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya menghitung harta yang dimiliki sebatas uang kas yang

dipegang saja, mereka tidak memahami bahwa pengertian harta lebih luas dari sekedar uang atau kas yang ada .

Sering kali dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi daripada pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan usaha yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.

Menurut Dharma (2010) dalam Febry Aditya mengatakan bahwa kendala yang sering dihadapi para pelaku bisnis UMKM adalah pemasaran produk, teknologi, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Seringkali para pelaku bisnis UMKM mengabaikan pengelolaan keuangan. Dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. Untuk meminimalisasi kejadian tersebut para pelaku UMKM harus menerapkan manajemen yang baik dalam pencatatan transaksi keuangannya. Mereka perlu dibekali kemampuan dalam membukukan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Menurut Hafsah (2004) dalam Irma wati kansil (2013), keterbatasan sumberdaya manusia usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit berkembang secara optimal.

Ketidakmampuan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen. Kelemahan ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UMKM dalam mengembangkan usaha. Padahal laporan keuangan yang berkualitas merupakan bagian dari akuntansi yang menjadi salah satu komponen mutlak yang harus dimiliki UMKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan atau lembaga keuangan

lainnya. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas harus ditumpuhkan dikalangan UMKM.

Laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahannya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada laba semata.

Menggunakan akuntansi yang memadai dapat menjadikan pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat lainnya (Warsono, 2009) dalam Rizki dan Sylvia (2011).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2011. Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM masih sangat rendah. SAK ETAP juga masih dianggap memberatkan UMKM. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan

banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya. Perusahaan atau pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam perusahaan terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelolaan usaha kecil menjadiberantakan dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UMKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

Diterbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang tidak signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general pupose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Pada umumnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik, oleh karena itu pengguna SAK ETAP banyak terdiri dari entitas dengan kategori usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) termasuk dalam ETAP karena tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan tidak untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika, bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal atau bukan entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (IAI: 2009).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya alasan peneliti mereplikasi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Penelitian ini mengukur variabel yang mempengaruhi penyusunan laporan

keuangan berbasis SAK ETAP dengan sudut pandang individu berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan sudut pandang organisasi, penelitian ini menggunakan variabel latar belakang pendidikan, skala usaha, dan umur usaha. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di wilayah Kota Medan. Alasan peneliti memilih sampel UMKM di kota Medan untuk mempermudah pengambilan data dan UMKM di kota Medan berpotensi untuk berkembang.

Selain itu, penulis tertarik mengambil responden UMKM panglong yang ada di Kota Medan karena ingin mengetahui tentang sistem pencatatan keuangan yang dilakukan pihak UMKM panglong tersebut, karena dengan mengetahui pencatatan yang dilakukan, maka dapat diprediksi kelangsungan usaha panglong dan prospek UMKM berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan. Melihat dari sisi lain usaha pemerintah mendukung pengusaha Sektor UMKM dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Pada Panglong Di Kota Medan.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Mengapa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sulit untuk diterapkan di usaha dengan skala UMKM?
2. Apakah penyebab pelaku UMKM tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam mengembangkan usahanya ?
3. Apakah penyebab rendahnya minat para pelaku UMKM dalam mengutamakan kualitas pada laporan keuangan ?
4. Mengapa pelaku UMKM belum menggunakan laporan keuangan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan ?

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan indentifikasi masalah yang telah dijabarkan serta keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan penulis maka penulis hanya membatasi pada pembahasan tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Panglong hal ini untuk memudahkan penulis untuk menganalisis lebih dalam tentang materi-materi tersebut.

1.4.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pengelola UMKM panglong kota Medan mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?

2. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sesuai untuk Panglong?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP pada UMKM panglong ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman pengelola UMKM panglong mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada UMKM panglong.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UMKM panglong dalam penerapan SAK ETAP.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

- a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

- b. Bagi UMKM Panglong :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi UMKM Panglong dalam kelangsungan usahanya.

c. Bagi Akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam hal perkembangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah :

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembantuan keputusan atau kebijakan dalam mengembangkan sektor UMKM.

e. Bagi Publik :

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya UMKM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan sektor UMKM.